

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia yang selalu mengalami peningkatan dan pertumbuhan serta merupakan tulang punggung dari setiap perekonomian di seluruh dunia, Stephen (2011). UMKM yang baik akan mampu meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran dan juga mengurangi kemiskinan, Gilbert (2013). Menurut Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (2015) menyatakan bahwa populasi pelaku UMKM mencapai 99,9% yang menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 59,08% atau senilai Rp4.869,57 triliun, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4% pertahun. Menyumbang volume ekspor mencapai 14,06% atau senilai Rp166,63 triliun dari total ekspor nasional dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional sebesar 52,33%. Besarnya jumlah UMKM tersebut mencerminkan besarnya potensi yang dapat di kembangkan dan ditingkatkan bagi UMKM untuk dapat berkontribusi bagi negara ini, hal itu juga membuktikan bahwa UMKM berperan penting dalam ekonomi secara meluas kepada masyarakat yang merupakan wadah untuk penciptaan wirausaha baru. UMKM juga dianggap memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat regional dengan potensi penciptaan lapangan yang cukup besar, Robert (2006).

Di era teknologi digital ini, kian berkembangnya bisnis yang terjadi di dalam jaringan elektronik atau bisnis online, yang biasa disebut dengan *e-commerce*. dengan munculnya *e-commerce* ini merupakan salah satu sebagai terobosan bagi kebangkitan UMKM di Indonesia, khususnya yang bergerak di industri kreatif. Hal ini juga dapat berpotensi memperluas kesempatan bagi produk lokal untuk semakin berkembang baik regional, nasional maupun internasional karena informasi yang didapat cukup luas, yang bisa memberikan manfaat bagi kalangan pengusaha maupun konsumen, sehingga UMKM terus mengalami peningkatan baik barang maupun jasa.

Perkembangan tersebut tidak lepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit para pelaku. Dalam melakukan penyaluran kredit biasanya pihak bank atau lembaga keuangan tersebut mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari usaha tersebut, oleh karena itu UKM harus dilakukan dengan baik ada kebutuhan bagi mereka untuk menarik dan mengamankan keuangan. Penyedia keuangan tidak akan menginvestasikan atau menyediakan dana kecuali ada keyakinan investasi tersebut aman, Gilbert (2013). karena pada umumnya mereka tidak mempunyai keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja. produktivitas dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah dari pada kegiatan bisnis lainnya, Jadi usaha kecil tersebut perlu di apresiasi dan perlu di bina agar dapat berkembang dengan baik yang nantinya akan sangat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia, Serta menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Perkembangan sektor UMKM yang demikian dapat menyiratkan bahwa terdapat potensi dan kemungkinan besar untuk menciptakan usaha menengah yang tangguh. Dengan demikian, sangat diperlukan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sebenarnya bukan hanya untuk kemudahan memperoleh kredit dari kreditur, tetapi untuk mengetahui laba atau rugi yang sebenarnya, pengendalian aset, kewajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi, yang pada akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha dan pengembangan pasar.

Usaha kecil membutuhkan keterampilan pembukuan yang mudah aplikasinya, guna membantu mereka mengakses pembiayaan dari perbankan. UMKM juga membutuhkan informasi keuangan yang sebanding sebagai hasil dari dunia global. Namun, pengetahuan, pengalaman, dan sumber data keuangan yang diperlukan untuk mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional dalam entitas yang lebih kecil memerlukan pendekatan yang efisien dan hemat biaya, Wittsiepe (2008) oleh karena itu, Supaya UMKM dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada 17 juli 2009 yang efektif berlaku pada 1 Januari 2011, dimana dalam standar ini di khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang tidak memiliki akuntabilitas publik dalam upaya mengembangkan usahanya dan juga diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan internal usaha tersebut. SAK ETAP ini diusulkan dan dirancang untuk entitas yang menghasilkan laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi

kebutuhan pelaporan keuangan perusahaan kecil dan untuk mempertahankan mudah dan akurat pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai penyedia sumber daya dan pengguna lain seperti manajer non pemilik, pemberi pinjaman, vendor, kreditur, pelanggan dan karyawan, Pacter (2009).

Sesuai laporan keuangan SAK ETAP (2016), UMKM minimal melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan harus konsisten, kecuali terjadinya perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian dan pengklasifikasian yang bertujuan untuk menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemulihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Sebagian besar penyedia keuangan juga meyakinkan bahwa dengan informasi akuntansi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi yang memadai akan mengurangi resiko, karena UMKM juga membutuhkan pengamanan keuangan yang baik, dan hal ini akan meningkatkan kinerja tingkat umum dalam kegiatan ekonomi, Gilbert (2013). Praktik akuntansi UKM menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan relevan diperlukan untuk memperbaiki keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengusaha. Nelson & Onias (2011), penerapan akuntansi yang baik juga akan mempengaruhi kinerja keuangannya, Asaduzzaman (2016).

Sampai saat ini masih banyak dijumpai perusahaan UMKM yang belum melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. hal itu disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan UMKM seperti usia perusahaan, ukuran, lokasi, bentuk hukum dan industri sangat berkaitan

dengan tingkat pertumbuhan bisnis, Davissson *et al.* (2002). Kurangnya pelatihan dan biaya juga di pandang sebagai hambatan utama dalam implementasi SAK ETAP, meskipun penerapan SAK ETAP lebih murah dibandingkan dengan penerapan set lengkap IFRS, biaya pelaksanaan tetap menjadi salah satu hambatan yang dirasakan oleh UMKM, Merve (2017). Pengusaha UMKM membutuhkan tingkat informasi yang memadai agar mampu menghasilkan catatan akuntansi yang benar, karena informasi akuntansi yang tidak memadai merupakan faktor utama kegagalan usaha kecil, Gilbert (2013) dan UMKM juga membutuhkan pelatihan yang baik, karena kurangnya pelatihan yang di terima membuat pengusaha kesulitan dalam implementasi SAK ETAP, sehingga pemberian informasi dan pelatihan perlu ditingkatkan supaya proses implementasi SAK ETAP akan lebih cepat dan lebih mudah untuk diterapkan, Merve (2017).

1.2 Fenomena Penelitian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri Forum Ekonomi Islam Dunia (2016), dalam kesempatan yang sama, Chairman of the WIEF Foundation Tun Musa Hitam mengemukakan bahwa sekitar 60 juta UMKM di Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun jumlah yang besar ini tidak diikuti dengan kualitas SDM yang memadai akibat dari rendahnya kualitas SDM yang menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah seperti produk yang ditawarkan tidak mampu bersaing karena rendahnya kualitas, harga tidak bersaing dan strategi pemasaran yang lemah

karena penguasaan teknologi informasi yang kurang. Perusahaan kecil di Indonesia umumnya cenderung untuk memilih norma perhitungan tanpa menyusun laporan keuangan, karena berbagai alasan, misalnya biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan di dapatkan, kemampuan para pelaku UMKM untuk laporan keuangan sangatlah rendah. Atas dasar itulah yang mendorong komite Standar Akuntansi Internasional untuk menyusun standar akuntansi yang khusus untuk UMKM, di Indonesia DSAK dan IAI telah menyusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP yang di adopsi dari *IFRS for SMEs*, dan disesuaikan dengan keadaan UMKM di Indonesia, Maturidi (2017).

Potensi yang besar dari UMKM tersebut juga sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha. Sebenarnya terdapat program pembiayaan UMKM yang dijalankan oleh pemerintah. Salah satu program tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2009 di targetkan sekitar Rp 20 triliun. Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala karena akses perbankan untuk mendapatkan pembiayaan, namun realisasi KUR tersebut jauh dari target Rp 20 triliun, yakni hanya sebesar Rp 14, 8 triliun. Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut karena mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait kondisi keuangan UMKM. Oleh karena itu, diperlukanlah akuntansi keuangan yang memadai, Siregar (2012).

1.3 GAP Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai laporan keuangan UMKM dengan berbagai faktor-faktornya telah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian lain, diantaranya penelitian serta temuan Abdulaziz (2013) menyatakan bahwa para pelaku UMKM yang berada di wilayah Australia belum melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar, dinyatakan bahwa faktor ukuran dan umur usaha serta pendidikan dan pengalaman pengusaha memiliki pengaruh positif dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Eirle & Haller (2009) menyatakan bahwa ukuran usaha memiliki pengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, namun tidak signifikan. Hal ini di dukung oleh penelitian Heng lalin (2015), menyatakan bahwa UMKM yang berada di wilayah Kamboja belum menyusun laporan keuangan dengan baik, hal tersebut karena kurangnya pengetahuan akuntansi, mereka berpersepsi bahwa informasi akuntansi sangat berguna dalam menyusun laporan keuangan. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sian & Roberts (2009) menyatakan bahwa informasi akuntansi tidak memiliki hubungan positif terhadap penyusunan laporan keuangan, Sehubungan dengan adanya simpang siur dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada pengusaha UMKM di wilayah Kecamatan Duren Sawit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI WILAYAH KECAMATAN DUREN SAWIT”

1.5 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

- 1) Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan hal sangat penting untuk di terapkan pada pengusaha UMKM karena hal ini sangat mendorong pengusaha tersebut untuk lebih maju. Dengan menerapkan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar maka akan memudahkan pengusaha untuk mengetahui perkembangan usahanya, melihat kondisi bisnis dan juga memudahkan dalam mengambil keputusan.
- 2) Ukuran usaha mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat total aset yang dimiliki, jumlah karyawan yang dikerjakan dan juga berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi.
- 3) Informasi akuntansi yaitu cara yang digunakan untuk memberikan pengetahuan atau cara untuk mengenalkan dan membantu pengusaha UMKM dalam implementasi SAK ETAP.
- 4) Persepsi pengusaha sangat perlu diketahui, karena persepsi mempunyai sifat yang subjektif, yang bergantung pada kemampuan dan keadaan masing-masing individu.

2. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup batasan masalah yang ingin diteliti adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Duren Sawit. Yang nantinya akan dilakukan penelitian lebih lanjut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan yaitu :

- 1) Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap Implementasi SAK ETAP ?
- 2) Apakah pemberian informasi akuntansi berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP ?
- 3) Apakah persepsi pengusaha berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP ?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP .
- 2) Untuk mengetahui apakah pemberian informasi akuntansi berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP .

- 3) Untuk mengetahui apakah persepsi pengusaha berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP.

1.7 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis
 - (1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman ilmu dalam menyusun laporan keuangan.
 - (2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi serupa berikutnya.
- 2) Secara Praktis
 - (1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP agar dapat menentukan kebijakan dalam melakukan usahanya di periode berikutnya.
 - (2) UMKM memiliki kemampuan untuk memunculkan industri-industri kecil lainnya yang bersifat fleksibel dan bervariasi serta memunculkan enterpreniur baru yang berani menanggung resiko.